

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021

Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
Email: litbangkotamalg@gmail.com

Abstrak. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk *output*, *outcome*, *impact*. Indikator Kinerja Daerah meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks daya beli, angka kemiskinan, persentase penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), indeks pembangunan gender, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dan indeks modal sosial. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang tahun 2021 yaitu untuk mengukur capaian indikator kinerja daerah tahun 2021, mengukur capaian indeks pembangunan masyarakat dan indeks modal sosial tahun 2021 berdasarkan data primer yang dilakukan secara survei, melakukan *review* terhadap target/sasaran indikator-indikator tersebut yang telah ditetapkan di Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023, melakukan analisis antara hasil capaian yang diperoleh pada tahun 2021 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan di Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023, memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang berdasarkan hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Faktor Pendekatan *Principal Component Analysis (PCA)*, dan *Gap Analysis*.

Kata Kunci: indikator kinerja, kinerja daerah

Abstract. *Performance Indicators are signs that function as a means of measuring the performance of an activity, program or target in the form of outputs, results, impacts. Regional Performance Indicators include the Human Development Index (HDI), education index, health index, purchasing power index, poverty rate, percentage decline in PMKS, gender development index, Community Development Index (IPMas), and social capital index. The objectives of the preparation of Malang City Regional Performance Indicators in 2021 are to measure the achievement of regional performance indicators in 2021, to measure the achievement of the community index and social capital index in 2021 based on primary data conducted in a survey, to review the targets/targets of these indicators that have been set. in the Draft Regional Regulation for Amendment to the RPJMD of Malang City in 2018-2023, analyzing the results obtained in 2021 with the targets/targets that have been set in the Draft Regional Regulation for Amendment to the RPJMD for the City of Malang in 2018-2023, providing policy recommendations and steps what needs to be done by the Malang City Government based on research results based on research results. The analytical method used in this study is the Principal Component Analysis (PCA) Approach Factor Analysis, and Gap Analysis.*

Keywords: *performance indicators, regional performance*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023, sebagaimana yang telah diundangkan peraturan daerah, sudah dilengkapi dengan target dan proyeksi indikator kinerja daerah dari beberapa program. Hal tersebut sangat penting dikarenakan indikator

kinerja merupakan rujukan yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), serta dampak (*impact*).

Secara teknis, pengukuran *output* sebagai salah satu ukuran kinerja merupakan suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan untuk mewujudkan atau menghasilkan

outcome. *Outcome* merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program yang selanjutnya akan memberikan dampak. *Impact* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *outcome* beberapa program.

Oleh karena itu, penting sekali melakukan kajian pengukuran indikator kinerja suatu daerah untuk dapat melihat capaian kinerja suatu daerah melalui proses program yang sudah direncanakan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan proyeksi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan target yang direncanakan daerah, yang secara teknis disampaikan dalam bentuk dokumen kajian.

Sebagai pertimbangan, kajian pengukuran Indikator Kinerja Daerah dilakukan rutin setiap tahun oleh Kota Malang sebagai analisis atas dasar target pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan

sembilan sasaran indikator kinerja yang harus dilakukan evaluasi dan analisis dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa sembilan indikator tersebut menjadi bagian yang sangat penting sebagai indikator utama dalam mengukur kinerja daerah secara keseluruhan karena masing-masing indikator ini memiliki keterkaitan antar satu indikator dengan indikator lainnya. Secara spesifik terdapat dua indikator yang secara khusus dapat menggambarkan kondisi pembangunan masyarakat Kota Malang yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Modal Sosial (IMS). IPMas dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam mengukur kemajuan capaian pembangunan masyarakat dan gambaran mengenai kondisi pembangunan Kota Malang.

Selain itu juga IMS memiliki peran yang dapat memperkuat kapasitas organisasi yang mewadahi kegiatan ekonomi. Mereka menganggap modal sosial sebagai aset dalam pengembangan ekonomi dapat dilihat dari kapasitas dan kinerja organisasi-organisasi berbasis komunitas, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi nirlaba dan badan-badan pemerintah.

Tabel 1. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	81,43	81,86	81,705	82,00	82,248
Indeks Pendidikan	0,78	0,79	0,770	0,771	0,772
Indeks Kesehatan	0,814	0,816	0,818	0,821	0,823
Indeks Daya Beli	0,847	0,848	0,850	0,851	0,852
Angka Kemiskinan	3,91	3,76	3,978	3,874	3,768
Indeks Modal Sosial	81,36	83,52	85,68	87,84	90
Persentase Penurunan PMKS	5%	5%	5%	5%	5%
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836	0,852	0,868	0,884	0,90
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,8	96,9	97,0	97,1	97,2

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Sebagai contoh, berbagai bentuk lembaga pembangunan masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat lainnya itu misalnya, telah memainkan peranan utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat miskin di banyak negara berkembang (Syahra, 2003). Dan juga, bagaimana kesadaran pendidikan dan kesehatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja daerah ini melalui sembilan indikator tersebut saling berkaitan.

Selain itu, secara khusus kajian pengukuran Indikator ini sangat penting dilakukan karena memasuki tahun 2020 kondisi dunia sedang mengalami pandemi virus Corona (Covid-19), termasuk Indonesia. Dimana dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan, tetapi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah adanya pergeseran anggaran program kegiatan yang dialokasikan untuk menangani dampak covid-19 termasuk di Kota Malang. Hal tersebut tentu juga berdampak secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja daerah meskipun diharapkan tidak berdampak secara signifikan.

Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang bekerja dengan Universitas Brawijaya bekerja sama melaksanakan kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Daerah untuk mengukur, menganalisis dan melakukan proyeksi capaian indikator kinerja daerah di tahun 2021 ini.

2. Tinjauan Pustaka

Indikator Kinerja Daerah

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen

dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan (Setiawan & Hakim, 2013).

b. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

c. Indeks Kesehatan

Dimensi kesehatan sebagai salah satu komponen Indeks Pembangunan manusia (IPM) memiliki Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikatornya.

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

d. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang dapat digunakan dapat menaikkan atau menurunkan nilai daya beli masyarakat. Maka, kemampuan daya beli masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda.

e. Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan dapat ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan, dan ekonomi

(konsumsi per kapita) (Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang, 2017).

f. Persentase penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karena hal tersebut tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

g. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender (Fajriyyah dan Budiantara, 2015). IPG meliputi tiga dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan ekonomi.

h. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Pembangunan masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, keserasian, kemampuan sendiri kaderisasi. Prinsip keterpaduan berarti bahwa program atau kegiatan pembangunan masyarakat disusun oleh, bersama, dalam dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan. Progres dari pembangunan masyarakat tersebut salah satunya dituangkan dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas).

i. Indeks Modal Sosial

Modal sosial berkaitan erat dengan modal manusia karena modal sosial terbentuk dari hubungan sosial antar

manusia. Tiga kelompok indikator modal sosial, yaitu sikap percaya dan toleransi, partisipasi dalam kelompok dan jejaring, serta resiprositas dan aksi bersama (Statistik Modal Sosial, 2014).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu metode pengumpulan sampel dan metode analisa.

1. Metode pengambilan sampel

Responden yang terpilih adalah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk tergolong tenaga kerja), serta dibagi berdasarkan kecamatan, kelurahan, serta RW. Jumlah sampel terpilih yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{591.987}{1+591.987(0,05)^2} = 400$$

N : jumlah sampel

N : ukuran populasi (penduduk usia 15-64 tahun) (Jumlah penduduk berdasarkan Kota Malang dalam Angka tahun 2021)

e : standar error (0,05)

Berdasarkan perhitungan sampel didapatkan minimal 400 responden yang akan dibagi menjadi lima kecamatan di Kota Malang.

2. Metode Analisa

a. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk memperoleh angka IPM dilakukan dua tahapan berikut (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2015):

1. Melakukan perhitungan indeks masing-masing komponen pembentuk IPM yang akan menghasilkan angka $0 < \text{indeks } X_i < 1$. Untuk mempermudah pembacaan, maka persamaan dikalikan 100, sehingga menjadi $0 < \text{indeks } X_i' < 100$.
2. Melakukan perhitungan nilai IPM dengan merata-ratakan nilai indeks komponen penyusun IPM. Rumus yang digunakan yaitu (BPS, 2015):

$$IPM = \sqrt[3]{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Ekonomix}100}$$

Keterangan

Indeks Pendidikan = Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks harapan lama sekolah) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$$\text{Indeks } X_i = \frac{X_i - X_{(i)min}}{(X_{(i)maks} - X_{(i)min})}$$

Keterangan

X_1 = Indikator ke-I (i = 1, 2, 3...)

X_2 = Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$

X_3 = Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$

Tabel 2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM (=X(1))	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka harapan hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	26.572.372*)	1.007.435**)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Tabel 3. Klasifikasi Capaian IPM

Klasifikasi	Capaian IPM
Sangat tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

b. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan adalah rata-rata dari penjumlahan indeks melek huruf dengan indeks rata-rata lama sekolah. Perhitungan indeks pendidikan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017) yaitu:

1. Angka harapan lama sekolah

Cara menghitung angka harapan sekolah adalah sebagai berikut (Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo, 2017):

- a. Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas).
- b. Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah

menurut umur (7 tahun ke atas).

- c. Menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas).

$$HLS = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

E_i^t = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = usia (a, a+1, ..., n)

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

HLS_{min} = angka harapan sekolah minimal

HLS_{maks} = angka harapan sekolah maksimal

2. Rata-rata lama sekolah

Tahap selanjutnya menghitung rata-rata lama sekolah dengan rumus sebagai berikut (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2015):

$$RLS = \frac{\sum f_i \times j_i}{\sum f_i}$$

Keterangan:

RLS = Rata-rata lama sekolah

f_i = frekuensi penduduk 15 tahun ke atas pada jenjang pendidikan ke- i

j_i = lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang ditamatkan atau yang pernah diduduki

i = jenjang pendidikan

$$Indeks RS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

RLS_{min} = RLS terendah (ditetapkan sebesar 0 tahun)

RLS_{maks} = RLS tertinggi (ditetapkan sebesar 15 tahun)

Untuk memperoleh indeks pendidikan, indeks harapan lama sekolah dan indeks angka rata-rata lama sekolah digabungkan menjadi satu menjadi:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

c. Indeks Kesehatan

Perhitungan untuk mencari indeks kesehatan adalah sebagai berikut (BPS, 2015):

$$Indeks\ Kesehatan = \frac{(AHH - AHH_{min})}{(AHH_{maks} - AHH_{min})}$$

Keterangan:

AHH_{min} = Angka Harapan Hidup terendah (ditetapkan sebesar 20 tahun)

AHH_{maks} = Angka Harapan Hidup tertinggi (ditetapkan sebesar 85 tahun)

d. Indeks Daya Beli

Untuk keperluan perhitungan konsumsi per kapita riil atau tingkat daya beli penduduk digunakan tahapan berikut (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2015):

1. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita (A).
2. Mendapatkan pola konsumsi Susenas untuk mendapatkan pola IHK yang sesuai (B).
3. Melakukan deflasi nilai A dengan IHK yang sesuai (C).
4. Menghitung standar daya beli penduduk. Data dasar yang

digunakan berupa harga dan kuantum dari suatu paket komoditi yang terdiri dari 96 komoditi yang diperoleh dari Susenas, di mana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Perhitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus (BPS, 2015):

$$PPP/unit = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

P_{ij} = Harga Komoditas i di kabupaten/kota j

P_{ik} = Harga Komoditas i di Provinsi Jawa Timur

m = jumlah komoditas

$$IPengeluaran = \frac{\ln(Pengeluaran) - \ln(Pengeluaran)_{min}}{\ln(Pengeluaran)_{max} - \ln(Pengeluaran)_{min}}$$

Provinsi Jawa Timur dijadikan patokan/standar, supaya IPM khususnya PPP kabupaten/kota dapat diperbandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

5. Membagi nilai C dengan PPP/unit (D). Menyesuaikan nilai D dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal dari D (E).

e. Angka Kemiskinan

Human poverty index mengukur kemiskinan dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup minimal. Nilai HPI dihitung dengan menggunakan rumus yang ditujukan untuk negara berkembang (HPI-1). Rumus HPI-1 [4] adalah sebagai berikut (UNDP, 1997).

$$HPI1 = \left[\frac{1}{3} (P_1^\alpha + P_2^\alpha + P_3^\alpha) \right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

Keterangan:

P_1 = Persentase orang meninggal di bawah usia 40 tahun

P_2 = Persentase orang dewasa buta huruf

P_3 = Persentase penduduk tidak terjangkau akses air bersih dan balita gizi buruk

$\alpha = 3$

f. Persentase Penurunan PMKS

Rumus yang digunakan untuk menentukan penurunan PMKS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yaitu (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017):

$$\frac{\text{jumlah PMKS}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Rumus lain untuk menentukan persentase penurunan PMKS adalah sebagai berikut (Matriks RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019):

$$\text{Penurunan PMKS} = \frac{(\sum \text{PMKS tahun } (n) - \text{tahun } (n-1))}{(\sum \text{PMKS tahun } (n-1))} \times 100\%$$

g. Indeks Pembangunan Gender

Perhitungan IPG tidak lagi membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio berikut (BPS, 2019):

$$IPG = \frac{IPM_p}{IPM_l} \times 100$$

Keterangan:

IPG = Indeks pembangunan gender

IPM_p = Indeks pembangunan manusia perempuan

IPM_l = Indeks pembangunan manusia laki-laki

Berikut merupakan interpretasi IPG:

1. IPG < 100 : capaian perempuan < capaian laki-laki
2. IPG = 100 : capaian perempuan sama dengan laki-laki
3. IPG > 100 : capaian perempuan > capaian laki-laki

h. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Nilai IPMas dihitung menggunakan "nilai rata-rata tertimbang dimensi indeks. Dalam penghitungan survei indeks

pembangunan masyarakat terhadap 3 dimensi indeks yang dihitung dengan rumus berikut (Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, 2019):

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot (1)}}{\text{jumlah item pertanyaan}}$$

Untuk mendapat nilai masing-masing dimensi indeks digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan perhitungan berikut:

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{\text{total dari nilai persepsi per item}}{\text{total item yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

i. Indeks Modal Sosial

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat pada hubungan sosial. Semakin besar cakupan modal sosial yang ingin diteliti maka semakin kompleks indikator untuk mengukur besaran modal sosial tersebut. IMS terbentuk dari tujuh faktor, yaitu:

1. Sikap percaya
2. Toleransi agama
3. Toleransi suku
4. Resiprositas
5. Partisipasi dalam aksi bersama
6. Partisipasi dalam kelompok
7. Jejaring

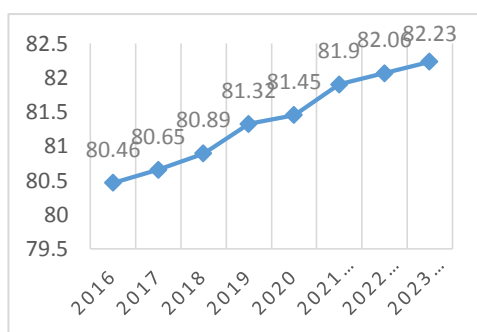
HASIL DAN PEMBAHASAN

Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang 2021

Peramalan dilakukan dengan metode *Eksponensial Smoothing* guna menghasilkan prediksi tahun 2021 yang belum ada atau belum dipublikasikan oleh BPS Kota Malang dan instansi terkait untuk tujuh indikator penyusun Indikator Kinerja Daerah.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil proyeksi IPM tahun 2021 dihasilkan dari prediksi tiga komposit penyusun IPM. Apabila dilihat berdasarkan perhitungan komponen penyusunan IPM, yaitu angka harapan hidup (indeks kesehatan), rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (indeks pendidikan), konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996 (indeks daya beli). Ketiga komponen tersebut didapatkan berdasarkan hasil proyeksi. Berikut merupakan hasil perhitungan IPM.



Gambar 1. Proyeksi Capaian IPM Tahun 2021-2023 (Berdasarkan Perhitungan Komponen Penyusun)

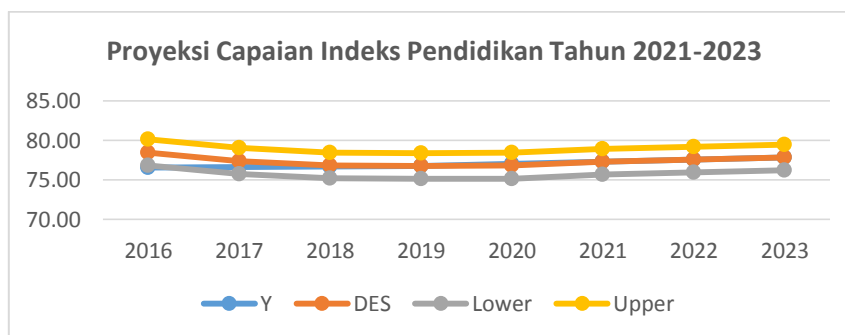
Sumber: Hasil Analisa (2021)

Berdasarkan Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa capaian IPM Kota Malang pada tahun 2021 adalah 81,90. Apabila dibandingkan dengan capaian

pada tahun 2020, maka mengalami kenaikan sebesar 0,45. Melihat proyeksi indeks daya beli yang menurun, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan investasi. Proyeksi capaian IPM pada tahun 2022-2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan (pengetahuan) adalah rata-rata dari penjumlahan antara rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi secara signifikan pada Indeks Pendidikan. Berdasarkan ketiga skenario tersebut, apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019-2020 (dengan kenaikan sebesar 0,31), maka proyeksi **skenario optimis dapat direkomendasikan**. Skenario ini juga didasari dari upaya dunia pendidikan yang terus melakukan adaptasi proses pembelajaran untuk memberikan kualitas dan akses pendidikan yang baik.



Gambar 2. Proyeksi Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2021-2023

Sumber: Hasil Analisa (2021)

Keterangan:

- Y = Kondisi terkini
- DES = Hasil proyeksi moderat
- Lower = Hasil proyeksi pesimis
- Upper = Hasil proyeksi optimis

Selain itu, kenaikan tersebut dapat dicapai pada tahun 2021-2023 karena adanya upaya pemerintah kota Malang untuk mendorong Pendidikan di Kota Malang secara merata. Strategi dalam menaikkan capaian tersebut antara lain (Rencana Strategis Dinas Pendidikan, 2018-2023):

1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas Pendidikan yang merata melalui keberpihakan pemerintah dalam menunjang Pendidikan karakter, keterjangkauan, dan berkelanjutan;
2. Pengenalan Keragaman budaya pada generasi melalui Pendidikan melalui gerakan seniman dan budayawan masuk sekolah;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga Pendidikan yang merata melalui distribusi tenaga Pendidikan yang merata, dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga pendidikan.

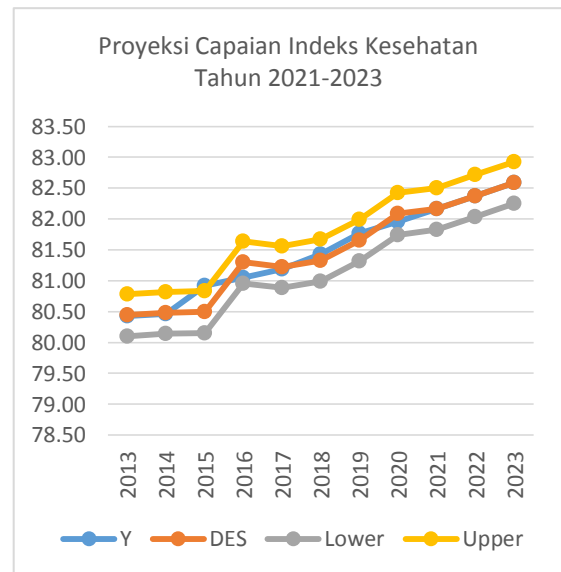
3. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan di Kota Malang pada lima tahun terakhir memiliki capaian yang meningkat, maka tidak menutup kemungkinan pada hasil proyeksi akan mengalami kenaikan meskipun terdapat pandemi COVID-19 di Kota Malang.

Berdasarkan hasil proyeksi, skenario yang dapat digunakan dalam memproyeksikan capaian Indeks Kesehatan pada tahun 2021-2023 adalah **proyeksi moderat**. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 capaian Indeks Kesehatan Kota Malang dapat menunjukkan angka 81,95, maka pada kondisi moderat tidak menutup kemungkinan capaian tersebut tetap meningkat meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19.

Selain itu, hasil proyeksi moderat maupun optimis

menunjukkan nilai di atas capaian pada tahun 2020, sedangkan pada proyeksi pesimis berada di bawah capaian tahun 2020.



Gambar 3. Proyeksi Capaian Indeks Kesehatan Tahun 2021-2023

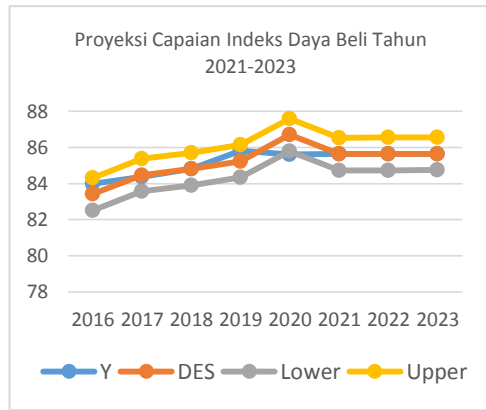
Sumber: Hasil Analisa (2021)

Keterangan:

- Y = Kondisi terkini
- DES = Hasil proyeksi moderat
- Lower = Hasil proyeksi pesimis
- Upper = Hasil proyeksi optimis

4. Indeks Daya Beli

Penurunan Indeks Daya Beli di Kota Malang selain disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, juga karena pengaruh inflasi dari kategori makanan, minuman, dan tembakau, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Penurunan tersebut juga disebabkan karena penurunan pendapatan masyarakat akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data capaian Indeks Daya Beli tahun 2016-2019 yang mengalami kenaikan, meskipun pada 2020 mengalami penurunan, maka tidak menutup kemungkinan hasil proyeksi pada tahun 2021-2023 cenderung naik.



Gambar 4. Proyeksi Capaian Indeks Daya Beli Tahun 2021-2023

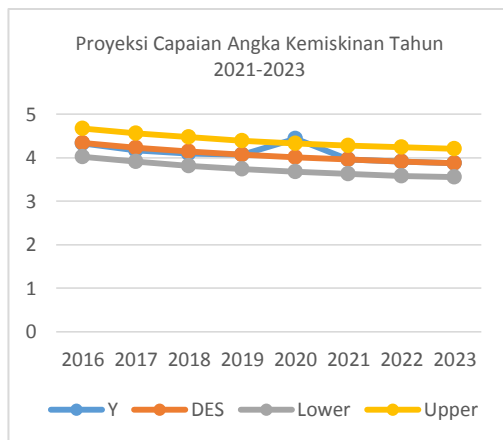
Sumber: Hasil Analisa (2021)

Keterangan:

- Y = Kondisi terkini
- DES = Hasil proyeksi moderat
- Lower = Hasil proyeksi pesimis
- Upper = Hasil proyeksi optimis

5. Angka Kemiskinan

Hadirnya pandemi COVID-19 pada 2020 di Kota Malang membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. Nilai capaian pada tahun 2020 sebanyak 4,44%. Berikut merupakan proyeksi angka kemiskinan di Kota Malang tahun 2021-2023, baik berdasarkan nilai optimis, moderat, maupun pesimis.



Gambar 5. Proyeksi Angka Kemiskinan Tahun 2021-2023

Sumber: Hasil Analisa (2021)

Keterangan:

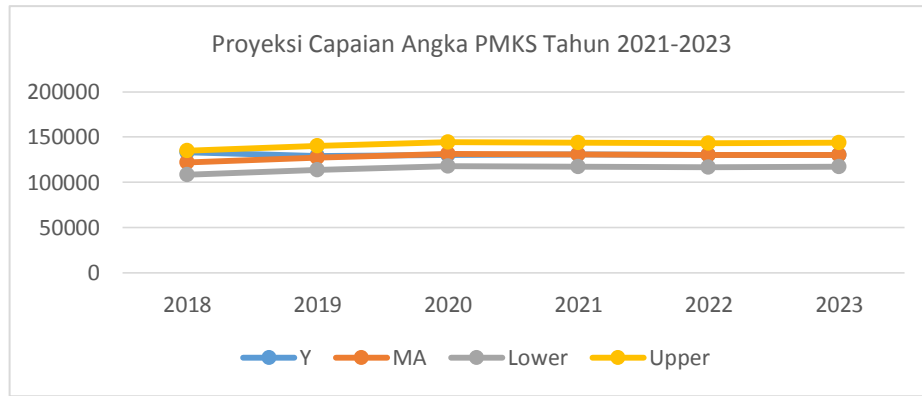
- Y = Kondisi terkini
- DES = Hasil proyeksi moderat
- Lower = Hasil proyeksi pesimis
- Upper = Hasil proyeksi optimis

Proyeksi angka kemiskinan di Kota Malang tahun 2021-2023 dilihat berdasarkan **skenario proyeksi moderat**. Strategi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja kelas menengah yang lebih produktif, memperoleh upah yang lebih tinggi, dan memberikan manfaat sosial. Selain itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menurunkan angka kemiskinan antara lain (Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018 -2023):

1. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat; dan
2. Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UMKM;

6. Persentase Penurunan PMKS

Persentase penurunan PKMS dilakukan berdasarkan rekapitulasi dari jumlah PMKS dijelaskan pada **Gambar 6**. Jumlah penurunan PMKS diambil berdasarkan **skenario proyeksi moderat**. Maka, persentase penurunan PMKS pada tahun 2021-2023 dijelaskan pada **Gambar 7**.

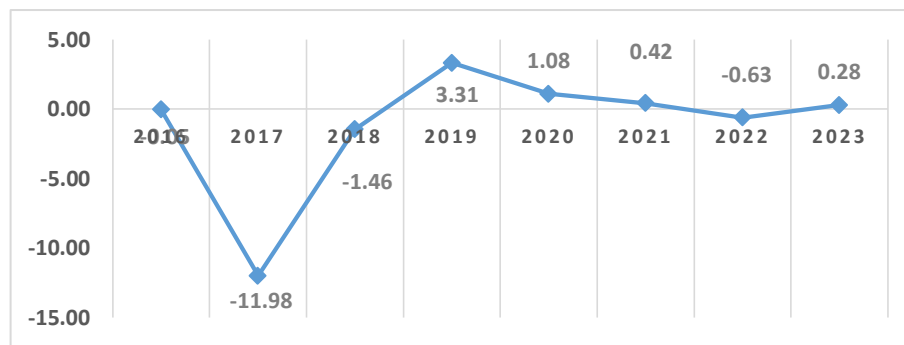


Gambar 6. Proyeksi Capaian Angka PMKS Tahun 2021-2023

Sumber: Hasil Analisa (2021)

Keterangan:

Y = Kondisi terkini MA = Hasil proyeksi moderat
 Lower = Hasil proyeksi pesimis Upper = Hasil proyeksi optimis



Gambar 7. Proyeksi Persentase Penurunan PMKS Tahun 2021-2023

Sumber: Hasil Analisa (2021)

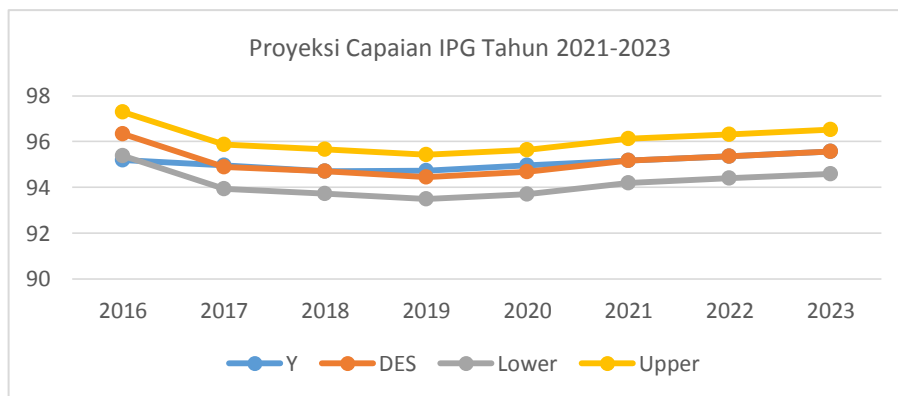
Grafik di atas menunjukkan bahwa penurunan persentase PMKS pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,42%. Persentase penurunan PMKS pada tahun 2021-2022 juga berkurang sebesar 0,63%, akan tetapi persentase penurunan PMKS meningkat sebesar 0,28% pada tahun 2023, dan Persentase penurunan PMKS kembali meningkat sebesar 0,02%.

Beberapa program yang telah diselenggarakan dalam sasaran persentase penurunan PMKS oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana antara lain (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang, 2021):

- a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial;
- b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- d. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Hasil proyeksi IPG pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Berikut penggambaran dari IPG mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2021-2023.



Gambar 8. Proyeksi Capaian IPG Tahun 2021-2023

Sumber: Hasil Analisa (2021)

Keterangan:

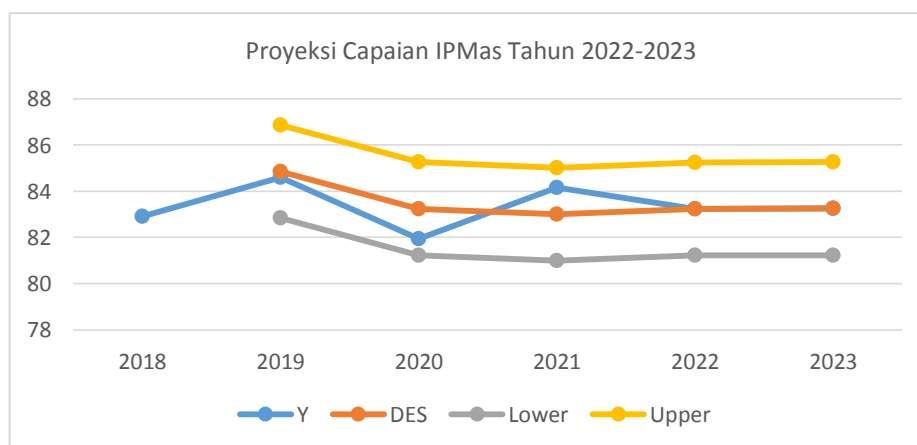
- Y = Kondisi terkini
- DES = Hasil proyeksi moderat
- Lower = Hasil proyeksi pesimis
- Upper = Hasil proyeksi optimis

Proyeksi capaian IPG di Kota Malang tahun 2021-2023 dilihat berdasarkan **skenario proyeksi moderat**, karena capaian IPG masa pandemi tidak terlalu berpengaruh. Namun, perlu adanya kebijakan responsif gender untuk menghindari kesenjangan gender yang semakin tinggi akibat pandemi COVID-19.

telah dilakukan selama 3 tahun yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Salah satu komponen IPMas, yaitu nilai toleransi, pada tahun 2021-2023 menunjukkan nilai persentase yang paling tinggi dibandingkan komponen lainnya. Situasi pandemi Covid-19 membuat masyarakat, tanpa terkecuali masyarakat Kota Malang, juga merasakan efek dari virus ini. Sangat dibutuhkan sikap toleransi dan berpikiran terbuka yang kadarnya lebih dari biasanya agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga.

8. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

IPMas disusun atas 3 komponen yaitu Indeks Rasa Aman, Indeks Gotong-Royong dan Indeks Toleransi. Kajian tentang IPMas



Gambar 9. Proyeksi Capaian IPMas Tahun 2022-2023

Sumber: Hasil Analisa (2021)

Keterangan:

- Y = Kondisi terkini
- DES = Hasil proyeksi moderat
- Lower = Hasil proyeksi pesimis
- Upper = Hasil proyeksi optimis

Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa capaian IPMas pada tahun 2022 dapat meningkat. Asumsinya, adalah bahwa di masa pandemi Covid-19, menjadi masa yang sangat tepat untuk menguatkan sikap dan tindakan kebersamaan, toleransi, tolong menolong antar warga dengan saling percaya, tanpa melihat suku, agama dan budaya dalam memerangi virus Covid-19.

9. Indeks Modal Sosial (IMS)

Indeks Modal Sosial (IMS) terdiri dari 3 komponen yaitu:

1. Sikap Toleransi dan Percaya
2. Aksi bersama
3. Kelompok dan Jejaring

Selain ketiga komponen tersebut, pada kajian ini juga menambahkan satu komponen lain, yaitu Tata Nilai. IMS Kota Malang telah dihitung di tahun 2018, 2019, dan 2020 berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada responden.

Berdasarkan capaian tahun 2021-2023, menunjukkan bahwa komponen yang memiliki nilai persentase yang

paling tinggi adalah aksi bersama. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam berbagai program kesehatan termasuk saat ini dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 (Wu *et al*, 2020). Selain itu, masyarakat Indonesia juga telah dilengkapi oleh modal sosial serta pengalaman menghadapi bencana di masa lalu. Maka, tidak menutup kemungkinan apabila nilai IMS pada tahun 2022 dapat meningkat.

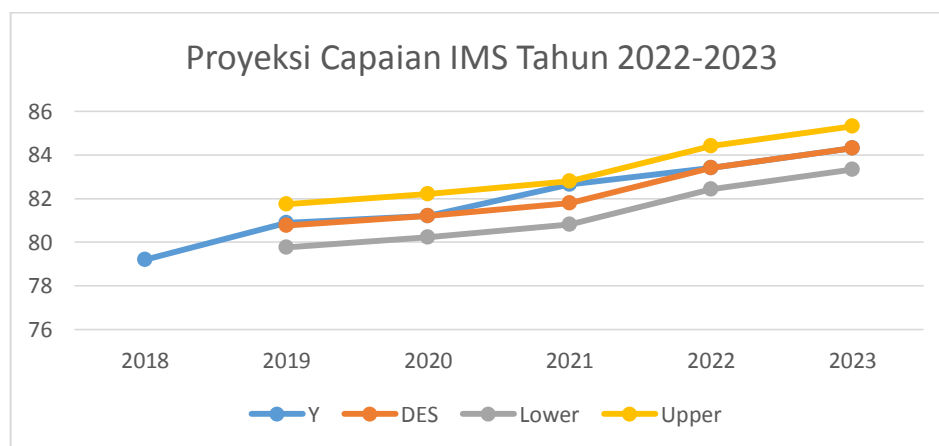
ANALISA GAP RASIO

Analisis gap rasio digunakan untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang tahun 2020 dibandingkan dengan capaian tahun 2019, proyeksi capaian tahun 2021, dan target RPJMD tahun 2020.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian tahun sebelumnya (2019)}} = \frac{81,45}{81,32} = 1,0015$$



Gambar 10. Proyeksi Capaian IMS Tahun 2022-2023

Sumber: Hasil Analisa (2021)

Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Y = Kondisi terkini | DES = Hasil proyeksi moderat |
| Lower = Hasil proyeksi pesimis | Upper = Hasil proyeksi optimis |

- b. Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian proyeksi tahun (2021)}} = \frac{81,45}{81,63} = 0,9977$$

- c. Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{Target RPJMD Tahun 2020}} = \frac{81,45}{81,86} = 0,9949$$

Hasil analisis gap rasio menunjukkan bahwa capaian IPM tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 1,0015. Capaian ini juga diprediksi akan meningkat pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi 2021 (rasio 0,9977). Namun capaian 2020 ini tidak sebesar target yang ditetapkan di RPJMD 2020 (rasio 0,9949).

2. Indeks Pendidikan

- a. Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian tahun sebelumnya (2019)}} = \frac{77,02}{76,71} = 1,0040$$

- b. Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian proyeksi tahun (2021)}} = \frac{77,02}{78,91} = 0,9760$$

- c. Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{Target RPJMD Tahun 2020}} = \frac{77,02}{79} = 0,9749$$

Hasil analisis gap rasio menunjukkan bahwa capaian Indeks Pendidikan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 1,0040. Capaian ini juga diprediksi akan meningkat pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi 2021 (rasio 0,9760). Capaian 2020 tidak tercapai

sesuai target yang ditetapkan di RPJMD 2020 (rasio 0,9749).

3. Indeks Kesehatan

- a. Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian tahun sebelumnya (2019)}} = \frac{81,95}{81,77} = 1,0022$$

- b. Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian proyeksi tahun (2021)}} = \frac{81,95}{82,17} = 0,9773$$

- c. Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{Target RPJMD Tahun 2020}} = \frac{81,95}{81,6} = 1,0042$$

Hasil analisis gap rasio menunjukkan bahwa capaian Indeks Kesehatan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 1,0022. Capaian ini juga diprediksi akan meningkat pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi 2021 (rasio 0,9773). Capaian 2020 sudah sesuai target yang ditetapkan di RPJMD 2020 (rasio 1,0042).

4. Indeks Daya Beli

- a. Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian tahun sebelumnya (2019)}} = \frac{85,61}{85,81} = 0,9976$$

- b. Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian proyeksi tahun (2021)}} = \frac{85,61}{84,73} = 1,0103$$

- c. Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{Target RPJMD Tahun 2020}} = \frac{85,61}{84,8} = 1,0095$$

Hasil analisis gap rasio menunjukkan bahwa capaian Indeks Daya Beli tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 0,9976. Capaian ini diprediksi akan menurun pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi 2021 (rasio 1,0103). Namun, capaian 2020 sudah sesuai target yang ditetapkan di RPJMD 2020 (rasio 1,0095).

5. Angka Kemiskinan

- a. Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian tahun sebelumnya (2019)}} = \frac{4,44}{4,07} = 1,0909$$

- b. Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian proyeksi tahun (2021)}} = \frac{4,44}{4,28} = 1,0373$$

- c. Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{Target RPJMD Tahun 2020}} = \frac{4,44}{3,76} = 1,1808$$

Hasil analisis gap rasio menunjukkan bahwa capaian Angka Kemiskinan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 1,0909, Capaian ini diprediksi menurun pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi 2021 (rasio 1,0373). Namun, capaian 2020 tidak sesuai target yang ditetapkan di RPJMD 2020 (rasio 1,1808).

6. Persentase Penurunan PMKS

- a. Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian tahun sebelumnya (2019)}} = \frac{1,08}{3,31} = 0,3262$$

- b. Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian proyeksi tahun (2021)}} = \frac{1,08}{0,42} = 2,5714$$

- c. Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{Target RPJMD Tahun 2020}} = \frac{1,08}{5} = 0,216$$

Hasil analisis gap rasio menunjukkan bahwa capaian Persentase Penurunan PMKS tahun 2020 mengalami kenaikan, sehingga rasio capaian terhadap tahun sebelumnya 0,3262. Persentase Penurunan PMKS diprediksi akan menurun pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi capaian 2021 (rasio 2,5714). Selain itu, Persentase Penurunan PMKS ini lebih rendah bila dibandingkan dengan target RPJMD 2020 (rasio 0,216).

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- a. Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian tahun sebelumnya (2019)}} = \frac{94,97}{94,72} = 1,0026$$

- b. Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{capaian proyeksi tahun (2021)}} = \frac{94,97}{95,16} = 0,9980$$

- c. Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2020)}}{\text{Target RPJMD Tahun 2020}} = \frac{94,97}{96,9} = 0,9800$$

Hasil analisis gap rasio menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan

rasio 1,0026. Capaian ini juga diprediksi akan meningkat pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi 2021 (rasio 0,9980). Namun, capaian 2020 tidak sesuai target yang ditetapkan di RPJMD 2020 (rasio 0,9800).

8. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

- a. Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2021)}}{\text{capaian tahun sebelumnya (2020)}} = \frac{84,15}{81,95} = 1,0268$$

- b. Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2021)}}{\text{Target RPJMD Tahun 2021}} = \frac{84,15}{86,8} = 0,9694$$

Hasil analisis gap rasio menunjukkan bahwa capaian IPMas pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 1,0268. Capaian 2021 tidak sesuai target yang ditetapkan di RPJMD 2021 (rasio 0,9694).

9. Indeks Modal Sosial (IMS)

- a. Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2021)}}{\text{capaian tahun sebelumnya (2020)}} = \frac{82,65}{81,2} = 1,0718$$

- b. Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD

$$\frac{\text{Capaian tahun sekarang (2021)}}{\text{Target RPJMD Tahun 2021}} = \frac{82,65}{85,68} = 0,9646$$

Hasil analisis gap rasio menunjukkan bahwa capaian Indeks

Modal Sosial tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 1,0718. Namun, capaian 2021 tidak sesuai target yang ditetapkan di RPJMD 2021 (rasio 0,9646).

KESIMPULAN

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran dari pencapaian hasil kinerja pemerintah pada suatu daerah. Pengukuran dan analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Malang 2020 memiliki 9 Indikator yang diukur serta dianalisis, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Persentase Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan PMKS, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dan Indeks Modal Sosial (IMS). Hasil perbandingan capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang 2021 dengan target capaian yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan **Tabel 4** dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sesuai dengan target Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, tiga indeks yang melampaui adalah Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, dan Persentase Penurunan PMKS. Enam indeks yang tidak sesuai target adalah Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Daya Beli, Angka Kemiskinan, Indeks Modal Sosial (IMS), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Tabel 4. Target capaian dalam Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

INDIKATOR	2019		2020		Ket	2021 (RPJMD 2018-2023)		Ket	2021 (Perubahan RPJMD 2018-2023)		Ket
	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Proyeksi		Target	Proyeksi	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,43	81,32	81,86	81,45	Tidak Sesuai Target	83,00	81,90	Tidak Sesuai Target	81,705	81,90	Tidak Sesuai Target
Indeks Pendidikan	0,78	0,77	0,79	0,77	Tidak Sesuai Target	0,82	0,78	Tidak Sesuai Target	0,77	0,78	Melampaui
Indeks Kesehatan	0,814	0,816	0,816	0,819	Melampaui	0,818	0,821	Melampaui	0,818	0,821	Melampaui
Indeks Daya Beli / Purchasing Power Parity	0,847	0,847	0,848	0,856	Melampaui	0,850	0,84	Tidak Sesuai Target	0,85	0,84	Tidak Sesuai Target
Angka Kemiskinan	3,91%	4,07%	3,76%	4,44%	Tidak Sesuai Target	3,59	3,95%	Tidak Sesuai Target	3,98%	3,95%	Tidak Sesuai Target
Indeks Modal Sosial	81,36	80,88	83,52	81,2	Tidak Sesuai Target	85,68	82,65	Tidak Sesuai Target	85,68	82,65	Tidak Sesuai Target
Persentase penurunan PMKS	5,00%	3,31%	5,00%	1,08%	Melampaui	5%	0,42%	Melampaui	5,00%	0,42%	Melampaui
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836	0,85	0,852	0,819	Tidak Sesuai Target	0,868	0,841	Tidak Sesuai Target	0,868	0,841	Tidak Sesuai Target
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,8	94,71	96,9	94,97	Tidak Sesuai Target	97,0	95,16	Tidak Sesuai Target	97	95,16	Tidak Sesuai Target

Sumber: Hasil Analisa (2021)

SARAN

Berdasarkan hasil perhitungan sembilan indikator kinerja daerah, secara umum memang menunjukkan capaian yang baik, namun hanya dua indeks yang melampaui angka yang telah ditargetkan dalam Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yakni Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, dan Persentase Penurunan PMKS. Indeks lainnya tidak sesuai target. Berdasarkan hal tersebut beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu adanya penyesuaian target indikator. Selain itu, perlu

ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka pendek dan menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya di berbagai sektor;

2. Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang telah dilakukan (sesuai dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat), agar ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh

masing-masing perangkat daerah, sehingga capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang dapat melampaui sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;

3. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan beberapa capaian Indikator Kinerja Daerah yang belum melampaui target Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;
4. Antisipasi ketahanan akibat pandemi berkepanjangan disarankan dilakukan dengan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, serta keberantaraan usaha, kemitraan, dan dampak sosial. Selain itu, program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin harus menjadi program prioritas pembangunan daerah. Serta regulasi untuk perlindungan tenaga kerja lokal dalam hal penentuan upah minimum Kota Malang dan pengendalian stabilitas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.
5. Capaian IPM melampaui dengan target Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Akan tetapi, adanya perbaikan di ketiga dimensi pembentuk IPM bersifat investasi jangka panjang tetap dilakukan. Oleh karena itu, untuk melihat hasil yang optimal memang dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 tahun ke depan. Pemerintah Kota

Malang juga harus melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan nilai IPM. Selain itu juga perlu disadari oleh para pemangku kebijakan bahwa peringkat bukanlah penentu kualitas, yang lebih penting adalah tingkat kategori yang dapat dicapai oleh angka IPM Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. (2015). *Laporan Akhir Analisis Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. DIY: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Modal Sosial Tahun 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fajriyyah, Nurul dan Budiantara, I Nyoman. (2015). Pemodelan Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline di Indonesia. *Jurnal. JURNAL SAINS DAN SENI ITS* Vol. 4, No.2, (2015) 2337-3520.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2019). *Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019*. Kabupaten Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Pemerintah Kota Malang. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023*. Kota Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Setiawan, Mohammad Bhakti & Hakim, Abdul. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal. Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1, April 2013.
- Syahra, Rusyidi. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal. Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003.